



RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI

TAHUN 2025-2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BINJAI

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Atas Rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai telah tersusun.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra disusun untuk menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun, sekaligus bahan evaluasi pencapaian kinerja. Tentunya sangat dimungkinkan adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan renstra ini, sehingga kami sangat menyambut kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua Aparatur di lingkungan kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai yang telah berkerja sama hingga penyusunan Rencana Strategis dapat diselesaikan. Semoga sumbangsih kita semua menjadi amal yang diberi balasan baik oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.



Binjai, September 2025
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

Drs. RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 196706211997021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

DAFTAR GAMBAR 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I. PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 9

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 9

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 9

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 16

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai ... 19

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 25

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 25

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 25

2.2.2. Isu Strategis 26

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28

3.1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 28

3.2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 30

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 32

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 .. 32

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan 36

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 82

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 82

BAB V. PENUTUP 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	10
Gambar 3.1.	Pohon Kinerja / Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029	35
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Strategis	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Data Pegawai Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Jumlah Aset Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	21
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat daerah Kota Binjai tahun 2021-2026	24
Tabel 2.6	Isu Strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Rensta Tahun 2025-2029	31
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	32
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	33
Tabel 3.4	Pentahapan Pembangunan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	34
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan Rensta Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	37
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan	50
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan, Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah	77
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	82
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas politik di tingkat daerah. Ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan, serta menciptakan iklim politik yang kondusif di daerah.

Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota Binjai di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada jangka menengah..

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 merupakan penerjemahan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2029 sesuai dengan lingkup tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Binjai bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
34. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 53);
37. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai;
35. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kota Binjai selama periode tahun 2025 hingga 2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025 - 2029, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
	Memuat informasi tentang peran (Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, serta memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-isu Strategis.

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB V	PENUTUP
	Menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Dengan diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tetap merupakan Perangkat Daerah Kota Binjai di bawah Wali Kota Binjai, sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Sekda), hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- f. Bidang Politik;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai



Adapun uraian tugas dan fungsi unsur-unsur dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
3. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;

4. melakukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan, serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
5. melakukan perumusan, perencanaan, pengawasan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan serta urusan umum lainnya.

b. Fungsi:

1. Menyusun program dan rencana kerja;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan kerumahtanggaan, pengadaan barang badan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
6. Menyusun rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta membuat laporan keuangan badan;
7. Menyusun rencana strategis (RENSTRA);
8. Menyusun Laporan Kinerja (LKj);
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi:

a. Sub bagian umum

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum, meliputi: menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan, mengelola administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, mengusulkan usul naik pangkat, kenaikan gaji berkala, mengelola urusan perpindahan, mutasi dan pension, mengelola ketatausahaan dan surat menyurat, mengelola administrasi umum, melaksanakan kegiatan dibidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pemeliharaan kesatuan bangsa, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pembauran bangsa dan pengembangan demokrasi.

b. Fungsi:

1. Merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
2. Merumuskan dan melaksanakan strategis ideologi negara, dan pembauran kebangsaan;
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan umum di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
5. Merumuskan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
6. Merumuskan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam perumusan kebijakan penanganan masalah kewaspadaan nasional lingkup wawasan dini dan penanganan konflik.

b. Fungsi:

1. Merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;

2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis negara/daerah, kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen kemanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah, pembinaan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan demokrasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan fasilitasi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
6. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
7. Mengembangkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
8. Melaksanakan pemantauan, pengumpulan informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik

pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 10. Merumuskan dan mengembangkan kapasitas aparatur Kesbang dan Politik di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- a. Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 - b. Fungsi:
 1. Merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
 2. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian strategi daerah tentang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 3. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi daerah tentang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 4. Melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 5. Melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
 6. Meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;

7. Melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
8. Melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
9. Meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Politik

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik

b. Fungsi

1. Merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
2. Menyusun data untuk pelaksanaan hubungan dengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
3. Merencanakan pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring dan pembinaan hubungandengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
4. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan hubungan antar lembaga;
6. Melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan politik pemerintahan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
7. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;

8. Meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politi, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai secara garis besar dikelompokkan atas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai secara keseluruhan berjumlah 50 orang dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2				
Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025				
No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
Berdasarkan Golongan				
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	3	1	4
3.	Golongan III	6	12	18
4.	Golongan IV	8	2	10
5.	Golongan V	1	0	1
6.	Golongan IX	0	1	1
	Jumlah	18	16	34
Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
1.	SD	0	0	0
2.	SLTP sederajat	0	0	0
3.	SLTA sederajat	4	2	6
4.	Diploma	0	2	2
5.	S-1	10	8	18
6.	S-2	4	4	8
7.	S-3	0	0	0
	Jumlah	18	16	34
Berdasarkan Jabatan				
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	0	1	1
4.	Fungsional	2	7	9
4.	Non Eselon	11	7	18
	Jumlah	18	16	34
Tenaga Non ASN				
1.	Operator Komputer	3	11	14
2.	Security	1	0	1
3.	Cleaning Service	0	1	1
	Jumlah	4	12	16

Sumber Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, selain dibutuhkan pemangku jabatan-jabatan struktural, juga diperlukan dukungan personil-personil yang memangku jabatan-jabatan fungsional yang secara umum maupun spesifik sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik. Diantara jabatan-jabatan fungsional yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah : Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Bendahara, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengadministrasi Perkantoran, Pengelola Data dan Informasi, Jabatan Perencana, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Fasilitator Pemerintahan, Pengadministrasi Persuratan, Analis Partai Politik, Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu, Analis Administrasi Perizinan Penelitian.

2. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024

No	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Proses lainnya (dst)	1	-	-	1
2	Electric generating set lainnya (dst)	1	-	-	1
3	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	-	-	1
4	Sepeda motor	6	-	-	6
5	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	-	-	4	4
6	Gergaji	-	-	1	1
7	Scanner	1	-		1
8	Lemari penyimpanan	4	-	9	13
9	Mesin ketik manual	-	-	2	2
10	Mesin ketik listrik	-	-	1	1
11	Mesin ketik lainnya	-	-	4	4
12	Mesin hitung elektronik	-	-	1	1
13	Lemari kayu	2	-	2	4
14	Rak basi	1	-	-	1
15	Rak kayu	2	-	-	2
16	Filling cabinet besi	7	2	9	18
17	Brandkas	-	-	3	3
18	Alat penghancur kertas	-	-	2	2
19	Mesin absensi	-	-	1	1
20	Papan pengumuman	3	-	-	3
21	Papan tulis	-	3	-	3
22	Meja kerja besi	-	-	1	1
23	Kursi besi	83	-	2	85
24	Kursi kayu	5	-	-	5
25	Meja rapat	8	-	-	8
26	Meja biro	38	-	16	54
27	Kursi fiberglass	10	1	54	65
28	Kursi rapat	4	1	-	5

29	Kursi tamu	6	-	-	6
30	Kursi putar	16	-	22	38
31	Kursi biasa	24	-	1	25
32	Bangku tunggu	2	-	-	2
33	Meja komputer	4	2	8	14
34	Sofa	2	-	-	2
35	Meubeleur lainnya	5	-	-	5
36	Jam elektronik	5	-	-	5
37	Lemari es	1	-	-	1
38	AC window	11	-	-	11
39	Kipas angin	10	-	4	10
40	Kompore gas (alat dapur)	1	-	-	1
41	Tabung gas	1	-	-	1
42	Televisi	4	-	4	8
43	Wireless	1	-	-	1
44	Stabilisator	2	-	-	2
45	Camera video	3	-	-	3
46	Camera film	1	-	-	1
47	Tiang Bendera	1	-	-	1
48	Dispenser	4	-	5	9
49	Handy cam	1	1	-	2
50	Gordyin/kray	1	-	13	14
51	Alat rumah tangga lain-lain	-	-	1	1
52	Lemari buku untuk pejabat eselon III	1	-	-	1
53	Audio monitor active	1	-	-	1
54	Uninterruptible power supply (UPS)	10	-	-	10
55	Slide projector	1	-	-	1
56	Camera film	1	-	-	1
57	Pesawat telephone	1	1	1	3
58	Handy talky (HT)	-	-	8	8
59	Faxmail	1	-	-	1
60	Peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	-	-	1	1
61	Antene MF/MW portable	-	-	1	1
62	Mikroskop dengan camera	1	-	-	1
63	Blender	1	-	-	1
64	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	-	-	-	0
65	Stabilizer	1	-	3	4
66	Alat laboratorium makanan lainnya (dst)	-	-	-	0
67	Pompa airasil	-	-	2	2
68	Alat degreening jeruk kap 100kg	-	-	-	0
69	Distilling apparatus	-	-	-	0
70	Meja kerja	1	-	-	1
71	Model jam bentuk besar	-	-	-	0
72	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	-	-	-	0
73	Recorder display lainnya (dst)	-	-	-	0
74	Sirine (proteksi lingkungan)	-	-	1	1
75	P.C unit	4	-	9	13
76	Laptop	9	2	5	16
77	Hard disk	3	-	-	3
78	Keyboard (peralatan mainframe)	-	-	5	5
79	Monitor	-	-	1	1
80	Printer (peralatan personal computer)	10	1	3	14

81	Bangunan gedung kantor permanen	1	-	-	1
82	Pagar permanen	1	-	-	1
83	Jalan khusus lainnya	1	-	-	1
84	Sumur dengan pompa (Bangunan pengambilan irigasi)	1	-	-	1
85	Jaringan telepon di atas tanah lain-lain	1	-	-	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai memberikan sejumlah layanan yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kota Binjai, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Internal, yaitu :
 - a. Penyusunan program Badan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
 - c. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
 - d. Penyusunan laporan Badan;
 - e. Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
 - f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - g. Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - h. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - k. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - l. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan.

2. Pelayanan Eksternal, antara lain :
 - a. Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
 - b. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
 - c. Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - d. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - e. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - f. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - g. Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela Negara.
 - i. Fasilitasi penanganan konflik sosial

j. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Binjai

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan melalui penerapan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan memperhatikan target dan indikatornya.

Realisasi dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai melalui capaian indikator kinerja khususnya untuk periode 2025-2029 dapat diuraikan berdasarkan sasaran sebagaimana tabel pada halaman berikutnya:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan ideologi dan pembauran kebangsaan																			
1	Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat	-	-	-	5 kasus	6 kasus	7 kasus	8 kasus	10 kasus	0 Kasus (tidak ada konflik)	0 Kasus (tidak ada konflik)	0 Kasus (tidak ada konflik)	0 Kasus (tidak ada konflik)	0 Kasus (tidak ada konflik)	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan																			
2	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	70	72	73	71	70	-	-	-	-	-
Sasaran 3 : Meningkatnya peran Generasi Muda Bebas Narkoba																			
3	Menurunnya jumlah penyalahgunaan narkoba	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	207	-	-	(172)	NA	207%	-	-	(172)%	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dan BPS Kota Binjai (Kota Binjai Dalam Angka 2025)

Berdasarkan tabel di atas, rentang waktu efektif dalam pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada periode Renstra 2021-2026 hanyalah sampai tahun 2024. Dan Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan ideologi dan pembauran kebangsaan

Indikator Sasaran ini adalah Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat, dimana rasio capaian setiap tahun selalu 100% kendati realisasinya 0. Angka 0 ini dikarenakan tidak terjadi konflik setiap tahunnya, yang mengindikasikan kota Binjai aman dari konflik sosial.

Kondisi Binjai yang aman, selain didukung oleh berjalannya sistem kewaspadaan dini, juga didukung dengan sigapnya Pemerintah Kota Binjai dan unsur Pimpinan daerah dalam merespon setiap potensi konflik yang ada.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan

Indikator sasaran 2 ini adalah Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif, dimana pada tahun akhir pengukuran (2024) didapatkan ada sekitar 71% ormas yang aktif di kota Binjai. Hasil ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi terakhir yang diukur di kota Bogor yaitu sebesar 70%. Namun perhitungan rasio pencapaian kinerja tidak dapat dihitung karena target renstra tidak tercantum.

Sasaran ini akan lebih optimal jika pelaksanaan sub kegiatan pendukungnya bisa dijalankan dengan maksimal. Ada 2 (dua) sub kegiatan yang dapat memberi pengaruh langsung terhadap sasaran ini, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dan juga sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya peran Generasi Muda Bebas Narkoba

Indikator Sasaran 3 adalah Menurunnya jumlah penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya justru terjadi penambahan angka penyalahgunaan narkoba sebesar 172 %, dan tentunya kinerja ini sangat jauh dari yang diharapkan.

Peningkatan angka ini bisa dimaknai sebagai Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, atau justru dikarenakan Meningkatnya keberhasilan deteksi dan pelaporan kasus akibat intensifnya operasi penegakan hukum, sosialisasi, maupun peran masyarakat dalam melaporkan kejadian.

Selain itu keterbatasan dalam alokasi anggaran membuat kegiatan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) sebagai kegiatan pendukung untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal penganggaran dan realisasinya maka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Binjai dapat diperhatikan pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel. 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Belanja Operasi	5.424.542.949	6.477.135.811	15.832.056.451	26.104.042.263	7.523.475.389	5.318.309.288	6.197.579.864	15.534.565.683	25.251.658.157	1.789.167.085	0,98	0,96	0,98	0,97	0,24	0,39	0,34
Belanja Pegawai	3.539.673.229	4.266.592.221	3.594.290.261	3.726.939.646	3.924.597.714	3.531.436.716	4.069.844.088	3.417.520.676	3.646.180.075	1.789.167.085	1,00	0,95	0,95	0,98	0,46	0,03	-0,11
Belanja Barang dan Jasa	1.248.639.020	1.574.312.890	1.539.423.890	3.168.410.717	2.012.493.675	1.150.641.897	1.491.505.076	1.418.702.707	2.396.786.182		0,92	0,95	0,92	0,76	-	0,23	-0,02
Belanja Hibah	636.230.700	636.230.700	10.698.342.300	19.208.691.900	1.586.384.000	636.230.675	636.230.700	10.698.342.300	19.208.691.900		1,00	1,00	1,00	1,00	-	3,92	3,90
Belanja Modal	12.182.400		23.820.000	51.080.000		9.620.000		20.122.560			0,79	-	0,84	-	-	-0,21	-0,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			23.820.000	25.540.000	65.556.700			20.122.560			-	-	0,84	-	-	0,02	-0,25
Belanja Modal Komputer				25.540.000							-	-	-	-	-	-0,25	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.182.400					9.620.000					0,79	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Total	5.436.725.349	6.477.135.811	15.855.876.451	26.155.122.263	7.523.475.389	5.327.929.288	6.197.579.864	15.554.688.243	25.251.658.157	1.789.167.085	0,98	0,96	0,98	0,97	0,24	0,39	0,34

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Juni 2025

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi total setiap tahunnya dan anggaran total setiap tahunnya sangat baik yaitu berkisar di antara 0,96 – 0,98, yang berarti bahwa tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa antara alokasi dan kebutuhan lapangan sejalan dan tidak banyak terjadi kelebihan dana. Hal ini juga menunjukkan komitmen OPD dalam merealisasikan program/kegiatan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai melakukan pelayanan kepada kelompok sasaran layanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Beberapa Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai antara lain adalah :

- a. Pelajar, Mahasiswa, Pihak Lain yang membutuhkan rekomendasi perizinan penelitian;
- b. Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (SKT);
- c. Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
- d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- g. Partai politik
- h. Seluruh Masyarakat Kota Binjai dalam rangka pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela Negara.
- i. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Binjai

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai yang umum terjadi berdasarkan hasil pengamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sepanjang periode 2021-2025 antara lain adalah Kualitas pelayanan publik belum maksimal yang tergambar dari permasalahan Akurasi Layanan administrasi (izin ormas, rekomendasi penelitian, dan lain sebagainya) yang belum maksimal. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena beberapa kondisi yang diantaranya adalah kondisi pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis digital, serta minimnya pendidikan dan pelatihan petugas pemberi layanan.

Selain itu, permasalahan pembinaan ideologi Pancasila & wawasan kebangsaan yang belum dipahami dan dimaknai serta diamankan secara maksimal oleh masyarakat, berpeluang memunculkan potensi konflik/ perpecahan sosial yang berkembang di masyarakat, belum maksimalnya Partisipasi Politik Masyarakat, belum maksimalnya Peran Organisasi Kemasyarakatan, hingga permasalahan maraknya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan gambaran di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utama (pokok) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah belum maksimalnya perwujudan kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau masalah yang signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus karena berdampak luas dan mendalam pada suatu organisasi, daerah, atau negara, serta memerlukan solusi segera dan terencana. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai masalah krusial yang jika tidak ditangani akan menghambat pencapaian tujuan jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah sebagaimana yang disajikan tabel pada halaman berikutnya.

Tabel 2.6
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Geografis yang Strategis dan keberagaman sosial, budaya, dan agama.	Adanya potensi konflik/ perpecahan sosial yang berkembang di masyarakat	Beban peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin berat (penduduk miskin kota, migrasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan dan pangan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Beban peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin berat (penduduk miskin kota, migrasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan dan pangan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat	Bonus Demografi	Aging Populasi	Kualitas dan Daya Saing SDM	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
			Peningkatan Urbanisasi Global			Penguatan Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama
						Penguatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Potensi Konflik Sosial
	Penyalahgunaan narkoba	Peningkatan Kapasitas Kapabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif dan Modern Peningkatan Kapasitas Kapabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif dan Modern	Ketidakstabilan Geopolitik dan Geoekonomi	Peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
	Partisipasi Politik Masyarakat Belum Maksimal					Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
	Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Belum Maksimal					Penguatan dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Adapun makna dari visi Pemerintah Kota Binjai 2025-2029 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Sedangkan Misi atau Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2029 tersebut, maka misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan,” dan Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif.”

Pada Misi ke-2 yang menjadi salah satu tujuan pemerintah daerah adalah “. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga (tujuan 6),” dengan salah satu sasarannya adalah “Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan (sasaran 8).”

Sedangkan pada Misi ke-4, salah satu tujuannya adalah “Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (tujuan 9),” dan yang menjadi salah satu sasarannya adalah “. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat (sasaran 14).”

Sesuai dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah kota Binjai tersebut, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 yaitu :

“Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia.”

3.2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029

Sasaran yang ingin dicapai adalah perumusan pencapaian spesifik yang ingin diwujudkan dan dapat diukur dalam rangka terwujudnya tujuan. Sehingga sesuai dengan tujuannya, maka Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah :

“Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Binjai terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia serta peningkatan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Berikut disajikan hubungan antara Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dan Sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2025-2029 :

Tabel. 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan	Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia		Indeks Demokrasi Indonesia	70 poin (Sedang)	74 poin (Sedang)	78 poin (Sedang)	80 poin (Tinggi)	84 poin (Tinggi)	90 poin (Tinggi)	-
			Indeks Harmoni Indonesia	NA	6,2 poin	6,3 poin	6,4 poin	6,5 poin	6,6 poin	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan		Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Binjai terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia serta peningkatan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Kerukun-an Umat Beragama Kota Binjai	70 poin (Tinggi)	70 poin (Tinggi)	72 poin (Tinggi)	72 poin (Tinggi)	73 poin (Tinggi)	73 poin (Tinggi)	-
			Angka Kriminalitas	1,800	1,725	1,650	1,575	1,500	1,425	-

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029

Strategi merupakan serangkaian tindakan dan pendekatan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi berfungsi sebagai arahan dan pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selana 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Binjai terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia serta peningkatan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakt, berbangsa dan bernegara	Memperkuat Edukasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai Pancasila	Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan serta internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat
		Meningkatan Kapasitas Demokrasi Melalui Pendidikan Politik	Meningkatkan fasilitasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat dan berintegritas
		Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah
		Meningkatkan peran FKUB dan tokoh agama dalam menjaga harmoni dan nilai toleransi sebagai bagian dari pengamalan nilai HAM dan Pancasila.	Meningkatkan fasilitasi dan penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh agama dalam membina toleransi, harmoni sosial, dan pemahaman nilai-nilai HAM dan Pancasila
		Memperkuat sistem informasi dini berbasis masyarakat dalam mendeteksi, dan mengatasi potensi konflik.	Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan menangani potensi konflik sosial

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah pernyataan umum yang memberikan pedoman atau kerangka berpikir dalam menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan dalam rencana strategis adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana suatu instansi akan bertindak untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, sesuai dengan arah pembangunan nasional/ daerah. Arah kebijakan tidak terlalu teknis, tapi memberikan gambaran strategis terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan.

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
1	Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Membangun sinergi Ormas dengan Program Pemerintah Kota Binjai.	Meningkatkan fasilitasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat dan berintegritas	-
2	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan		Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah	--
3	Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan peran sarana keagamaan dalam mendorong kerukunan umat beragama	Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan serta internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat	-
4	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah	Memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatkan fasilitasi dan penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh agama dalam membina toleransi, harmoni sosial, dan pemahaman nilai-nilai HAM dan Pancasila	-
5	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	Membangun Kampung Bebas Narkoba dalam Mendukung Program Penghentian Peredaran Narkoba.	Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan menangani potensi konflik sosial	-

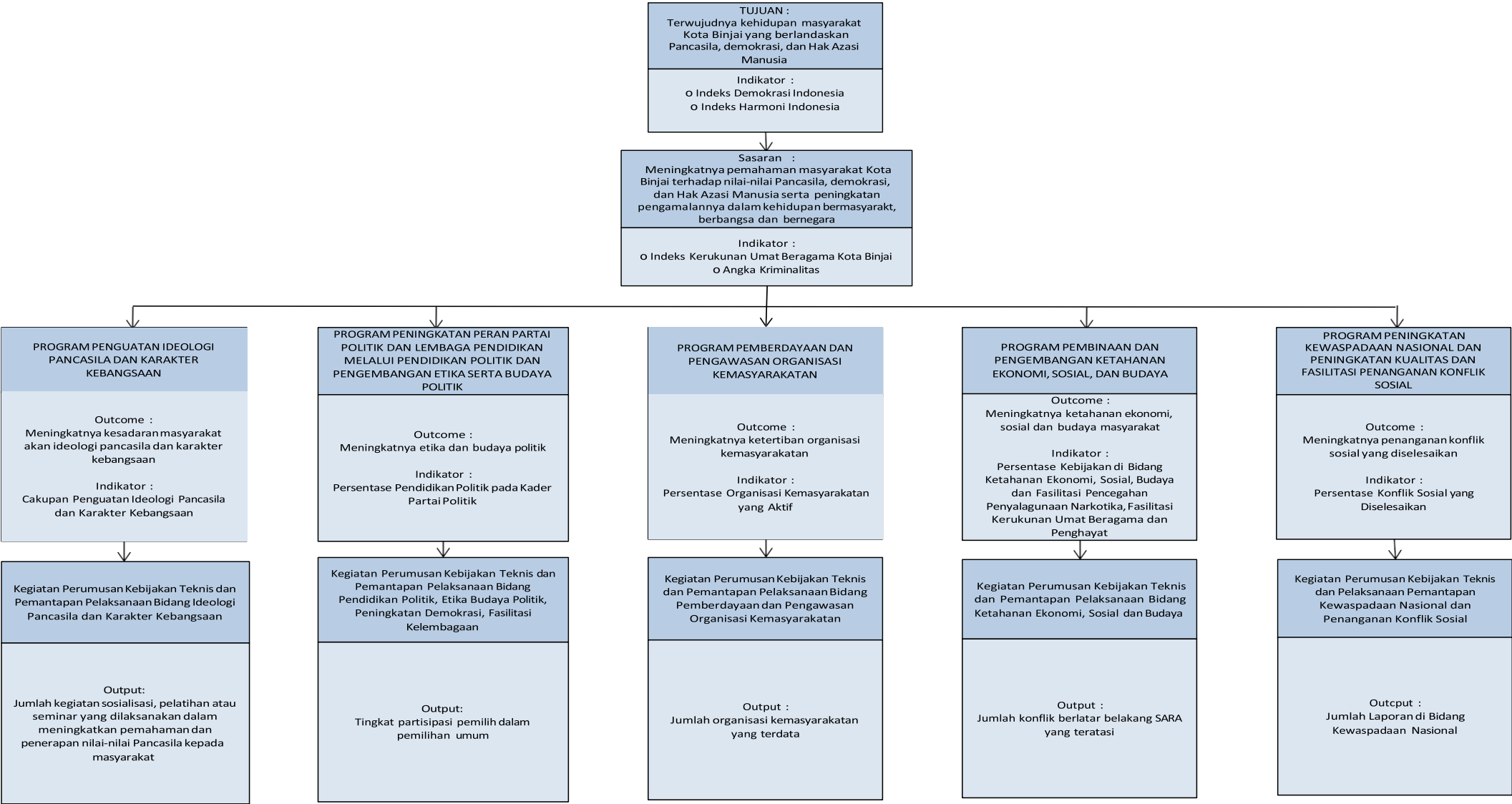
Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dapat diperhatikan sebagaimana tabel yang disajikan di bawah ini:

Tabel 3. 4.
Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025-2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Memperkuat fondasi dan sosialisasi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan	Mengoptimalkan pelaksanaan kewaspadaan dini dengan meningkatkan sinergi antara aparat dan masyarakat	Memperluas akses dan partisipasi positif masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan kapasitas aparat, partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan Demokrasi	Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, dan agama yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Selanjutnya untuk menguraikan sasaran strategis organisasi menjadi sasaran yang lebih kecil dan terukur, dan untuk memastikan semua elemen organisasi bekerja selaras menuju tujuan yang sama, maka perlu digambarkan melalui pohon kinerja. Pohon Kinerja Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana gambar pada halaman berikutnya.

Gambar 3.1
Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Tahun 2025-2029



BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

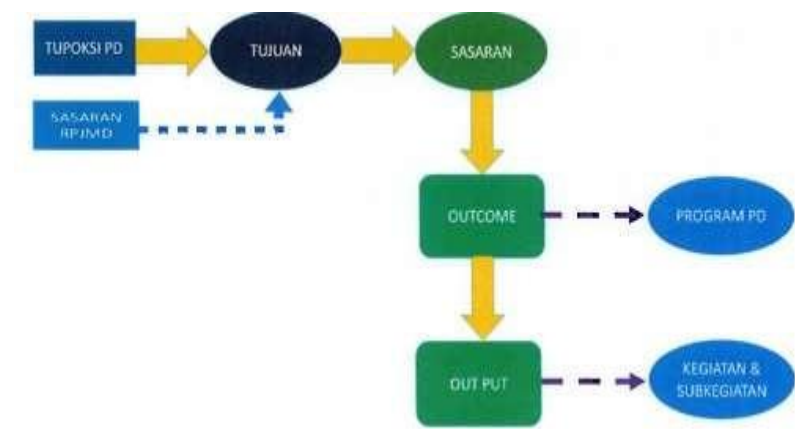
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Sedangkan Sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait.

Penentuan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis dilakukan sesuai dengan kerangka perumusan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan gambar berikut :

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis



Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesbangpol Kota Binjai Tahun 2025-2029 akan disajikan pada halaman berikutnya :

Tabel 4. 2
Teknik merumuskan Program/Kegiatan Renstra Badan Kesbangpol Kota Binjai
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai							
• Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat • Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan	Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Binjai yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia	Meningkatnya pemahaman masyarakat Kota Binjai terhadap nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia serta pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
					Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)		
					Angka Kriminalitas (Angka)		
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan atau seminar yang dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
			Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdata	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah konflik berlatar belakang SARA yang teratasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas data dan informasi BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas dan disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya fasilitas penunjang pelayanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam memberi pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE.T.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya usia penggunaan BMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sedangkan rencana program , kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.710.554.721		11.699.218.976		11.855.009.141		12.313.625.679		13.368.732.093		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.785.304.721		7.733.218.976		7.852.259.141		8.272.125.679		9.292.482.093		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	69	6.785.304.721	70	7.733.218.976	71	7.852.259.141	72	8.272.125.679	73	9.292.482.093	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.577.430.721		6.104.330.576		6.726.420.741		7.408.937.279		8.157.833.693		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1	5.577.430.721	1	6.104.330.576	1	6.726.420.741	1	7.408.937.279	1	8.157.833.693		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	16		16		16		16		16			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	33		33		33		33		33			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.222.479.365		5.731.901.653		6.336.165.372		6.999.964.141		7.729.206.898		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	33	5.222.479.365	33	5.731.901.653	33	6.336.165.372	33	6.999.964.141	33	7.729.206.898		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				339.551.356		356.528.923		374.355.369		393.073.138		412.726.795		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	339.551.356	12	356.528.923	12	374.355.369	12	393.073.138	12	412.726.795		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	16	5.000.000	16	5.500.000	16	5.500.000	16	5.500.000	16	5.500.000		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Meningkatnya kualitas data dan informasi BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				177.500.000		179.500.000		182.000.000		184.000.000		186.500.000		
Meningkatnya kualitas dan disiplin pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	177.500.000	4	179.500.000	4	182.000.000	4	184.000.000	4	186.500.000		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pegawai														
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.000		46.000.000		47.500.000		48.500.000		50.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	45.000.000	1	46.000.000	1	47.500.000	1	48.500.000	1	50.000.000		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
8.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	44.000.000	4	44.000.000	4	44.000.000	4	44.000.000	4	44.000.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				81.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	40	81.000.000	40	82.000.000	40	83.000.000	40	84.000.000	40	85.000.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				489.950.000		269.950.000		508.050.000		313.000.000		531.110.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	120	489.950.000	120	269.950.000	120	508.050.000	120	313.000.000	120	531.110.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		10.600.000		10.700.000		10.800.000		10.900.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	10.500.000	3	10.600.000	3	10.700.000	3	10.800.000	3	10.900.000		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				245.500.000		19.000.000		245.600.000		19.000.000		265.560.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	245.500.000	1	19.000.000	1	245.600.000	1	19.000.000	1	265.560.000		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.150.000		19.250.000		19.350.000		19.450.000		19.550.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	19.150.000	1	19.250.000	1	19.350.000	1	19.450.000	1	19.550.000		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.500.000		60.600.000		60.700.000		60.850.000		61.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4	60.500.000	4	60.600.000	4	60.700.000	4	60.850.000	4	61.000.000		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.500.000		20.600.000		20.700.000		20.800.000		20.900.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	10	20.500.000	10	20.600.000	10	20.700.000	10	20.800.000	10	20.900.000		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				16.300.000		16.400.000		16.500.000		16.600.000		16.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	120	16.300.000	120	16.400.000	120	16.500.000	120	16.600.000	120	16.700.000		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	10	105.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	10	120.000.000		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.000.000		861.000.000		115.500.000		43.000.000		74.000.000		
Meningkatnya fasilitas penunjang pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	57.000.000	1	861.000.000	1	115.500.000	1	43.000.000	1	74.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1		6		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000		825.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	1.000.000	6	825.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000		1.000.000		50.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1.000.000	1	1.000.000	1	50.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		1.000.000		27.500.000		1.000.000		30.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	25.000.000	1	1.000.000	1	27.500.000	1	1.000.000	1	30.000.000		
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		28.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	20.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000		
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.770.000		117.258.400		117.708.400		118.208.400		118.658.400		
Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam memberi pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12	110.770.000	12	117.258.400	12	117.708.400	12	118.208.400	12	118.658.400		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.850.000		2.900.000		2.950.000		3.050.000		3.100.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	4	2.850.000	4	2.900.000	4	2.950.000	4	3.050.000	4	3.100.000		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.320.000		56.358.400		56.358.400		56.358.400		56.358.400		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12	50.320.000	12	56.358.400	12	56.358.400	12	56.358.400	12	56.358.400		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		9.200.000		9.400.000		9.600.000		9.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1	9.000.000	1	9.200.000	1	9.400.000	1	9.600.000	1	9.800.000		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				48.600.000		48.800.000		49.000.000		49.200.000		49.400.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12	48.600.000	12	48.800.000	12	49.000.000	12	49.200.000	12	49.400.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				360.654.000		189.180.000		190.580.000		192.980.000		212.380.000		
Meningkatnya usia penggunaan BMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6	360.654.000	6	189.180.000	6	190.580.000	6	192.980.000	6	212.380.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		14		14		14		14			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	8		8		8		8		8			
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.154.000		112.780.000		112.780.000		112.780.000		112.780.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	62.154.000	14	112.780.000	14	112.780.000	14	112.780.000	14	112.780.000		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	8	25.000.000	8	26.000.000	8	27.000.000	8	28.000.000	8	29.000.000		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				235.000.000		11.500.000		11.500.000		12.500.000		30.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	235.000.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.500.000	1	30.500.000		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.500.000		18.700.000		18.900.000		19.100.000		19.300.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6	18.500.000	6	18.700.000	6	18.900.000	6	19.100.000	6	19.300.000		
8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.500.000		17.700.000		17.900.000		18.100.000		18.300.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6	17.500.000	6	17.700.000	6	17.900.000	6	18.100.000	6	18.300.000		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.765.000.000		1.778.500.000		1.791.000.000		1.803.500.000		1.814.000.000		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	67	1.765.000.000	70	1.778.500.000	72	1.791.000.000	75	1.803.500.000	77	1.814.000.000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.765.000.000		1.778.500.000		1.791.000.000		1.803.500.000		1.814.000.000		
Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan atau seminar yang dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	-	1	1.765.000.000	1	1.778.500.000	1	1.791.000.000	1	1.803.500.000	1	1.814.000.000		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	-	68		68		68		68		68			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	68	68		68		68		68		68			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	-	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				605.500.000		607.500.000		609.500.000		611.500.000		611.500.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	-	2.000	605.500.000	2.000	607.500.000	2.000	609.500.000	2.000	611.500.000	2.000	611.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				85.000.000		86.000.000		87.000.000		88.000.000		89.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		20	85.000.000	20	86.000.000	20	87.000.000	20	88.000.000	20	89.000.000		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	-	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, dan Bernegara				30.500.000		33.500.000		35.500.000		37.500.000		39.500.000		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	20	30.500.000	20	33.500.000	20	35.500.000	20	37.500.000	20	39.500.000		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				54.500.000		54.700.000		54.900.000		55.100.000		55.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	-	1	54.500.000	1	54.700.000	1	54.900.000	1	55.100.000	1	55.300.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				860.000.000		865.000.000		870.000.000		875.000.000		880.000.000		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	68	68	860.000.000	68	865.000.000	68	870.000.000	68	875.000.000	68	880.000.000		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				24.500.000		24.600.000		24.700.000		24.800.000		24.900.000		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	1	24.500.000	1	24.600.000	1	24.700.000	1	24.800.000	1	24.900.000		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				24.500.000		24.600.000		24.700.000		24.800.000		24.900.000		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	1	24.500.000	1	24.600.000	1	24.700.000	1	24.800.000	1	24.900.000		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				24.500.000		24.600.000		24.700.000		24.800.000		24.900.000		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	-	68	24.500.000	68	24.600.000	68	24.700.000	68	24.800.000	68	24.900.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.271.500.000		1.281.250.000		1.289.500.000		1.299.250.000		1.307.500.000		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	55	1.271.500.000	60	1.281.250.000	65	1.289.500.000	70	1.299.250.000	75	1.307.500.000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.271.500.000		1.281.250.000		1.289.500.000		1.299.250.000		1.307.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	200	1.271.500.000	200	1.281.250.000	200	1.289.500.000	200	1.299.250.000	200	1.307.500.000		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	20		20		20		20		20			
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.150.000.000		1.155.000.000		1.160.000.000		1.165.000.000		1.170.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	200	1.150.000.000	200	1.155.000.000	200	1.160.000.000	200	1.165.000.000	200	1.170.000.000		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30.500.000		31.750.000		32.500.000		33.750.000		34.500.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	20	30.500.000	20	31.750.000	20	32.500.000	20	33.750.000	20	34.500.000		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30.500.000		31.750.000		32.500.000		33.750.000		34.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	1	30.500.000	1	31.750.000	1	32.500.000	1	33.750.000	1	34.500.000		
8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				30.500.000		31.750.000		32.500.000		33.750.000		34.500.000		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	1	30.500.000	1	31.750.000	1	32.500.000	1	33.750.000	1	34.500.000		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				167.500.000		172.750.000		177.500.000		182.750.000		187.500.000		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	67	167.500.000	70	172.750.000	72	177.500.000	75	182.750.000	77	187.500.000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				167.500.000		172.750.000		177.500.000		182.750.000		187.500.000		
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdata	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)		1	167.500.000	1	172.750.000	1	177.500.000	1	182.750.000	1	187.500.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	85	90		90		90		90		90			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	-	90		90		90		90		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000	1	12.000.000		
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)		1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000	1	12.000.000		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				55.500.000		57.500.000		59.500.000		61.500.000		63.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	85	90	55.500.000	90	57.500.000	90	59.500.000	90	61.500.000	90	63.500.000		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				67.000.000		68.250.000		69.000.000		70.250.000		71.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	-	90	67.000.000	90	68.250.000	90	69.000.000	90	70.250.000	90	71.000.000		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	-	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				406.500.000		412.500.000		417.500.000		422.500.000		427.500.000		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	406.500.000	100	412.500.000	100	417.500.000	100	422.500.000	100	427.500.000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				406.500.000		412.500.000		417.500.000		422.500.000		427.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah konflik berlatar belakang SARA yang teratasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	5	406.500.000	5	412.500.000	5	417.500.000	5	422.500.000	5	427.500.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	-	180		180		180		180		180			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				282.500.000		285.500.000		287.500.000		289.500.000		291.500.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	-	180	282.500.000	180	285.500.000	180	287.500.000	180	289.500.000	180	291.500.000		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				78.500.000		79.500.000		80.500.000		81.500.000		82.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	40	40	78.500.000	40	79.500.000	40	80.500.000	40	81.500.000	40	82.500.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15.500.000		16.500.000		17.500.000		18.500.000		19.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	5	15.500.000	5	16.500.000	5	17.500.000	5	18.500.000	5	19.500.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				314.750.000		321.000.000		327.250.000		333.500.000		339.750.000		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	314.750.000	100	321.000.000	100	327.250.000	100	333.500.000	100	339.750.000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				314.750.000		321.000.000		327.250.000		333.500.000		339.750.000		
Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	25	314.750.000	25	321.000.000	25	327.250.000	25	333.500.000	25	339.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				45.500.000		46.750.000		48.000.000		49.250.000		50.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	60	45.500.000	60	46.750.000	60	48.000.000	60	49.250.000	60	50.500.000		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				86.500.000		87.750.000		89.000.000		90.250.000		91.500.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	25	86.500.000	25	87.750.000	25	89.000.000	25	90.250.000	25	91.500.000		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				101.250.000		102.500.000		103.750.000		105.000.000		106.250.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	12	101.250.000	12	102.500.000	12	103.750.000	12	105.000.000	12	106.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				51.500.000		53.000.000		54.500.000		56.000.000		57.500.000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	51.500.000	1	53.000.000	1	54.500.000	1	56.000.000	1	57.500.000		

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binnai Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai				
1.	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
3.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
6.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Meningkatnya penanganan konflik sosial	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	yang diselesaikan	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja, memastikan bahwa upaya yang dilakukan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tertera pada Bab. III, maka Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai									
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	-	70	74	78	82	86	90	
2.	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	-	-	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	70	70	72	72	73	73	
4.	Angka Kriminalitas	Angka	1.739	1.800	1.725	1.650	1.575	1.500	1.425	

4.3. **Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029**

Indikator Kinerja Kunci (IKD) adalah indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan. IKD digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Adapun IKD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	0	70	70	72	72	73	73	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	-	70	74	78	82	86	90	
2	Angka Kriminalitas	Angka	1,739	1.800	1.725	1.650	1.575	1.500	1.425	
II I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	-	50	55	60	65	70	75	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	-	65	67	70	72	75	77	
3	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,66	68	69	70	71	72	73	
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	-	65	67	70	72	75	77	

BAB V.

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai secara garis besar berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang telah tersusun dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada sisi lain keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolak ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Selanjutnya dalam menindaklanjuti Renstra ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai merekomendasikan rencana tidak lanjut sebagai berikut :

1. Penetapan prioritas pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Melaksanakan upaya pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sesuai dengan kinerja sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029;
3. Melakukan upayakan peningkatan kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi

Demikian Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan

penganggaran urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang ada di Kota Binjai. Akhirnya, keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2025-2029 sangat bergantung dari kesepahaman, kesepakatan komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Binjai yang diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor bidang kesatuan bangsa dan politik serta pada akhirnya dapat mendorong pencapaian visi dan misi kota Binjai tahun 2025-2029.



Binjai, September 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

**Drs. RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA TK. I**

NIP. 196706211997021002

L

a

m

p

i

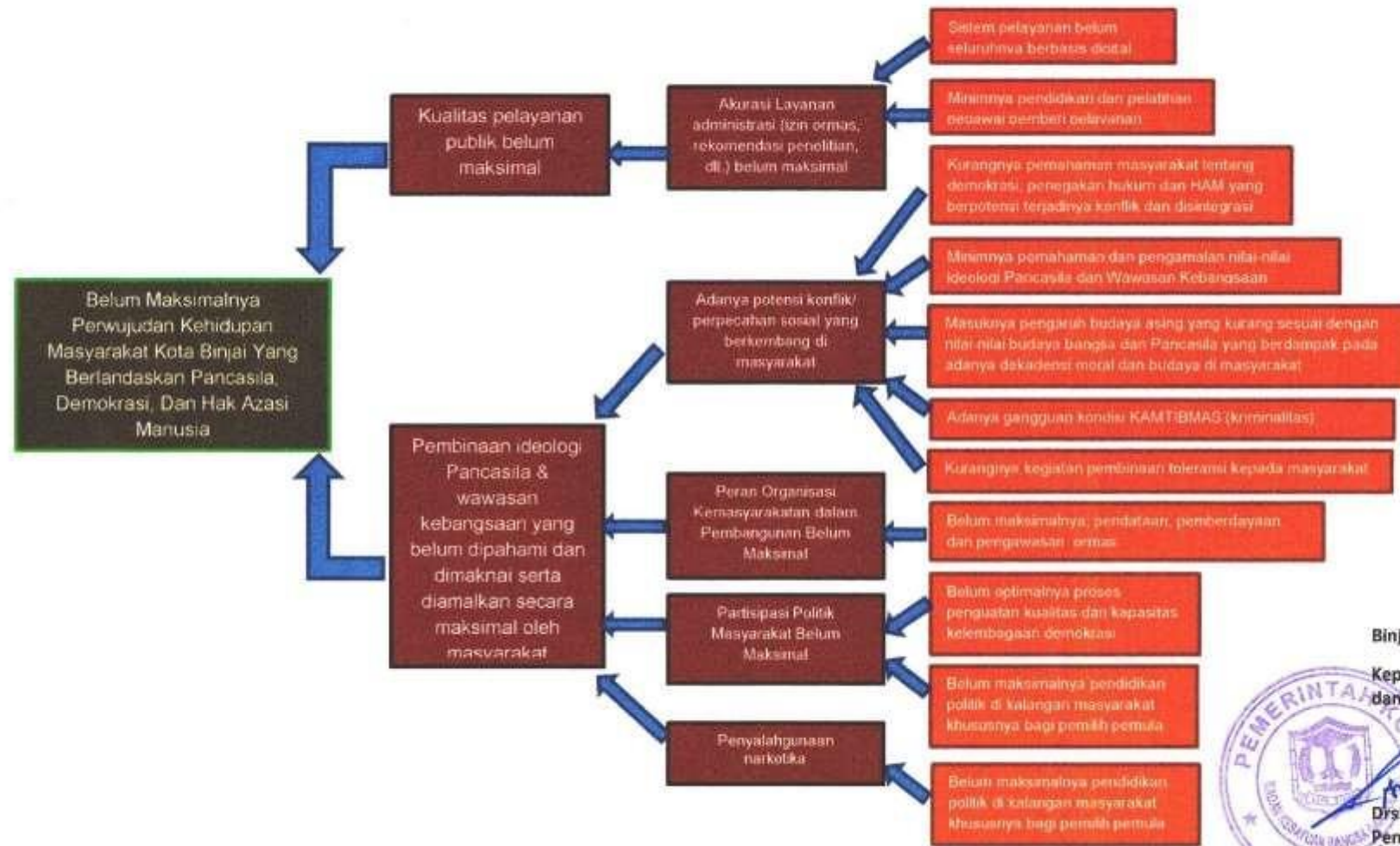
r

a

n

Lampiran 1

**POHON PERMASALAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
TAHUN 2025-2029**



Binjai, September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai



Drs. Ruslianto, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 196706211997021002

Lampiran 3

**CROSS CUTTING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
TAHUN 2025-2029**

